

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2019 DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DAN INFRASTRUKTUR DI KECAMATAN BABELAN

Syauqi Syamil Rabbani¹⁾, Danny Permana²⁾ Lukman Munawar Fauzi³⁾

1,2,3) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia.

Abstrak

Pengelolaan sampah merupakan salah satu permasalahan lingkungan di Kabupaten Bekasi yang berkaitan dengan meningkatnya jumlah penduduk, volume sampah, keterbatasan infrastruktur, dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Peraturan Bupati Bekasi Nomor 33 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah dan infrastruktur sampah di Kecamatan Babelan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kebijakan, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Analisis menggunakan teori Street-Level Bureaucracy Michael Lipsky yang mencakup diskresi petugas, keterbatasan sumber daya, beban kerja tinggi, strategi coping, interaksi masyarakat, serta ambiguitas aturan dan ketidakjelasan penegakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan, tetapi belum optimal. Pelaksana memiliki fleksibilitas dalam menyesuaikan tugas, namun menghadapi keterbatasan personel, armada, fasilitas, dan tingginya beban kerja. Strategi adaptasi telah dilakukan untuk menjaga pelayanan, sementara partisipasi masyarakat dalam pemilahan dan bank sampah belum merata. Penegakan aturan dan pengawasan juga belum konsisten. Diperlukan penguatan sarana prasarana, sumber daya manusia, koordinasi, pengawasan, dan partisipasi masyarakat.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Sampah, Street-Level Bureaucracy, Peraturan Bupati, Kecamatan Babelan

Abstract

Waste management is an environmental issue in Bekasi Regency associated with population growth, increasing waste generation, limited infrastructure, and uneven community participation. This study aims to analyze the implementation of Bekasi Regent Regulation Number 33 of 2019 concerning waste management and waste infrastructure in Babelan District. The study employed a descriptive qualitative approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving actors directly engaged in policy implementation and were analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña. The analysis applied Michael Lipsky's Street-Level Bureaucracy theory, covering officer discretion, resource limitations, high workload, coping strategies, community interaction, and policy ambiguity and unclear enforcement. The findings indicate that the policy has been implemented but has not yet reached an optimal level. Frontline implementers have

flexibility in adjusting their tasks, but face limitations in personnel, transportation fleets, facilities, and increasing workloads. Adaptive strategies have been used to maintain services, while community participation in waste sorting and waste banks remains uneven. Enforcement and supervision are also inconsistent. Strengthening infrastructure, human resources, coordination, supervision, and community participation is therefore required to improve the effectiveness and sustainability of waste management policy implementation in Babelan District.

Keywords: Policy Implementation, Waste Management, Street-Level Bureaucracy, Regent Regulation, Babelan District

PENDAHULUAN

Pengelolaan sampah di Indonesia telah diatur melalui berbagai kebijakan, antara lain Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012. Kebijakan tersebut menekankan pengurangan dan penanganan sampah, termasuk prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Namun, implementasi di tingkat daerah masih menghadapi keterbatasan kapasitas pengelolaan, infrastruktur, anggaran, pengawasan, dan kesadaran masyarakat (Mansur, 2022; Rismayanti et al., 2026). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum otomatis menjamin tercapainya pengelolaan sampah yang efektif.

Kabupaten Bekasi menghadapi persoalan serupa seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi. Data dalam skripsi menunjukkan timbunan sampah Kabupaten Bekasi sebesar 821.379,10 ton pada 2022, 809.935,00 ton pada 2023, dan 614.462,32 ton pada 2024. Pada 2024, persentase penanganan sampah tercatat 49,91 persen. Pemerintah Kabupaten Bekasi telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019 sebagai pedoman kebijakan dan strategi pengelolaan sampah, termasuk gerakan 3R, optimalisasi TPS3R, penguatan bank sampah, serta peran masyarakat (Syafer & Putera, 2024; Mulya Zein et al., 2024).

Kecamatan Babelan menjadi lokasi penting untuk dikaji karena masih ditemukan penumpukan sampah di sejumlah titik, keterbatasan petugas dan sarana, belum optimalnya bank sampah, serta partisipasi masyarakat yang belum merata. Skripsi juga mencatat bahwa Kecamatan Babelan memiliki luas sekitar 59,41 km² dan jumlah penduduk 280.928 jiwa berdasarkan data 2025 semester 1. Di sisi lain, hasil wawancara menunjukkan bahwa wilayah pelayanan UPTD Wilayah I menghadapi keterbatasan armada dan sumber

daya manusia, sehingga belum seluruh kebutuhan pelayanan dapat terpenuhi (Ramadhan, 2024).

Penelitian terdahulu banyak membahas partisipasi masyarakat, bank sampah, dan tata kelola pengelolaan sampah (Nabila et al., 2024; Putra & Ismaniar, 2022). Penelitian ini menempatkan persoalan tersebut dalam perspektif Street-Level Bureaucracy Michael Lipsky untuk melihat bagaimana pelaksana kebijakan menghadapi kondisi lapangan yang dinamis. Perspektif ini relevan karena implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh isi regulasi, tetapi juga oleh diskresi, keterbatasan sumber daya, beban kerja, strategi adaptasi, interaksi dengan masyarakat, serta ambiguitas aturan dan penegakan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Peraturan Bupati Bekasi Nomor 33 Tahun 2019 dalam pengelolaan sampah dan infrastruktur di Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi. Fokus analisis diarahkan pada enam dimensi Street-Level Bureaucracy untuk mengidentifikasi kondisi implementasi, hambatan, dan upaya yang dilakukan pelaksana kebijakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan tersebut digunakan untuk memahami fenomena implementasi kebijakan (Rita Fiantika et al., n.d.) berdasarkan pengalaman, tindakan, dan pandangan aktor yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Babelan. Unit analisis penelitian meliputi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah I, Pemerintah Kecamatan Babelan, serta pemerintah kelurahan yang terkait dengan lokasi penelitian. Informan ditentukan secara purposive berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam implementasi kebijakan. Informan penelitian berjumlah tujuh orang, yaitu Kepala Bidang Pengelolaan Sampah DLH Kabupaten Bekasi, Ketua UPTD Wilayah I, unsur Pemerintah Kecamatan, unsur Pemerintah Kelurahan Kebalen, petugas kebersihan, kader bank sampah, dan masyarakat Kecamatan Babelan. Data primer diperoleh melalui wawancara dan

observasi, sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumentasi dan studi kepustakaan.

Pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk melihat kondisi dan aktivitas pengelolaan sampah di lapangan. Wawancara dilakukan secara terbuka kepada informan untuk memperoleh pandangan mengenai pelaksanaan kebijakan. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data melalui arsip, foto, laporan, dan dokumen terkait. Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Bekasi Nomor 33 Tahun 2019 di Kecamatan Babelan telah berjalan, tetapi belum optimal. Temuan tersebut dianalisis melalui enam dimensi *Street-Level Bureaucracy* Michael Lipsky sebagai berikut.

Diskresi Petugas

Pelaksana kebijakan di lapangan memiliki ruang fleksibilitas untuk menyesuaikan tindakan ketika menghadapi kondisi yang tidak terduga. Petugas kebersihan dapat melakukan penyesuaian kerja dengan tetap berkoordinasi melalui UPTD Wilayah I. Pada tingkat pemerintah daerah, Dinas Lingkungan Hidup menerjemahkan regulasi ke dalam kebijakan teknis dan memberikan arahan kepada pelaksana lapangan. Diskresi tersebut diperlukan karena kondisi lapangan tidak selalu dapat diprediksi dan tidak seluruh persoalan dapat diselesaikan hanya dengan prosedur formal. Namun, fleksibilitas tersebut tetap bergantung pada koordinasi dan kapasitas sumber daya yang tersedia. Dengan demikian, diskresi pada implementasi kebijakan di Babelan berfungsi sebagai mekanisme penyesuaian agar pelayanan tetap berjalan, tetapi belum dapat mengatasi seluruh hambatan struktural yang dihadapi pelaksana.

Keterbatasan Sumber Daya

Keterbatasan sumber daya merupakan hambatan utama implementasi. Hasil wawancara menunjukkan keterbatasan personel,

armada pengangkut, dan fasilitas persampahan. Data wawancara UPTD Wilayah I menunjukkan terdapat 198 personel, 28 unit truk, dan 8 unit kendaraan roda tiga, tetapi jumlah tersebut dinilai belum mencukupi cakupan pelayanan. Keterbatasan juga terjadi pada fasilitas pengelolaan sampah. Berdasarkan pemantauan April 2026 yang disampaikan informan DLH, Kecamatan Babelan memiliki dua unit TPS3R dan 52 bank sampah, tetapi sarana yang tersedia belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan masyarakat.

Kondisi tersebut menyebabkan sebagian wilayah belum memperoleh pelayanan pengangkutan secara optimal. Efisiensi anggaran juga memengaruhi kemampuan pemerintah dalam menyediakan fasilitas secara menyeluruh. Upaya yang dilakukan antara lain pemetaan kebutuhan, monitoring dan evaluasi, pengajuan bantuan kepada pemerintah provinsi, pemanfaatan CSR, serta kerja sama dengan pihak swasta yang memiliki legalitas.

Beban Kerja Tinggi

Beban kerja petugas meningkat seiring pertumbuhan penduduk, perluasan permukiman, aktivitas ekonomi, dan volume sampah. Kecamatan Babelan berada di wilayah utara Kabupaten Bekasi, sedangkan TPA Burangkeng berada di wilayah selatan sehingga jarak pengangkutan menjadi salah satu kendala operasional. Keterbatasan armada juga menyebabkan sebagian pelayanan belum menjangkau seluruh wilayah.

Pelaksana berusaha menyesuaikan pembagian kerja berdasarkan kapasitas armada yang tersedia. Dalam kondisi tertentu, pelayanan juga dibantu oleh pihak swasta. Temuan ini memperlihatkan karakteristik street-level bureaucrats yang harus mengelola tuntutan pelayanan yang besar dengan sumber daya terbatas. Beban kerja yang tinggi berpotensi menurunkan cakupan dan kecepatan pelayanan apabila tidak diimbangi penambahan kapasitas.

Strategi Coping

Untuk mempertahankan pelayanan, pelaksana menerapkan berbagai strategi adaptasi. Ketika armada mengalami kerusakan, UPTD dapat mengalihkan dukungan dari armada lain. Dinas Lingkungan Hidup juga

melakukan penyusunan skala prioritas wilayah layanan berdasarkan kepadatan dan risiko timbulan sampah serta membuka kerja sama pengangkutan dengan pihak swasta yang legal. Pada tingkat kelurahan, pembentukan dan penguatan bank sampah dipandang sebagai salah satu inovasi untuk mengurangi tekanan terhadap sistem pengangkutan.

Strategi coping menunjukkan bahwa pelaksana tidak hanya menjalankan prosedur secara mekanis, tetapi melakukan improvisasi agar pelayanan tetap berlangsung. Meskipun demikian, strategi adaptasi tersebut lebih bersifat mengatasi kendala operasional dan belum sepenuhnya menggantikan kebutuhan terhadap penambahan sumber daya serta pembenahan infrastruktur.

Interaksi Masyarakat

Pemerintah Kabupaten melalui DLH, UPTD, kecamatan, kelurahan, dan kader bank sampah telah melakukan sosialisasi, seminar, rapat RT/RW, dan edukasi kepada masyarakat. Interaksi tersebut diarahkan untuk meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan sampah dan mendorong partisipasi melalui bank sampah. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih belum merata. Sebagian masyarakat telah mengikuti kegiatan pengelolaan sampah, tetapi masih terdapat masyarakat yang kurang mengetahui manfaat bank sampah dan belum melakukan pemilahan secara konsisten.

Efektivitas komunikasi juga menghadapi persoalan karena kegiatan sosialisasi sering hanya diikuti perwakilan RT/RW. Informasi yang diperoleh perwakilan tidak selalu tersampaikan secara utuh kepada warga lainnya. Temuan ini menunjukkan bahwa interaksi antara pelaksana dan masyarakat sudah tersedia, tetapi pola komunikasi dan jangkauannya masih perlu diperkuat agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, melainkan menjadi mitra aktif dalam pelaksanaan kebijakan.

Ambiguitas Aturan dan Ketidakjelasan Penegakan

Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019 telah menjadi kerangka umum bagi pelaksanaan pengelolaan sampah, tetapi pelaksana masih membutuhkan penjabaran teknis sesuai kondisi lapangan. Pada sisi penegakan, hasil wawancara menunjukkan bahwa tindakan terhadap

pelanggaran masih lebih banyak berupa teguran dan pembinaan. Penerapan sanksi sebagaimana terdapat dalam regulasi belum dilakukan secara optimal.

Keterbatasan personel menjadi salah satu faktor yang menghambat pengawasan. Pemerintah kecamatan juga menghadapi kondisi sosial dan ekonomi pelanggar ketika melakukan penanganan. Akibatnya, ketegasan penegakan belum konsisten. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan aturan yang jelas pada tingkat umum belum cukup tanpa mekanisme pengawasan, sumber daya penegak, dan penerapan sanksi yang konsisten. Penguatan sosialisasi dan penjabaran teknis diperlukan agar masyarakat memahami kewajiban serta konsekuensi pelanggaran.

KESIMPULAN

Implementasi Peraturan Bupati Bekasi Nomor 33 Tahun 2019 dalam pengelolaan sampah dan infrastruktur di Kecamatan Babelan telah berjalan, tetapi belum optimal. Pelaksana memiliki fleksibilitas dalam menyesuaikan tindakan melalui diskresi, namun masih menghadapi keterbatasan personel, armada, fasilitas, dan tingginya beban kerja. Berbagai strategi coping telah digunakan untuk menjaga keberlangsungan pelayanan, termasuk penyesuaian operasional, pengalihan armada, koordinasi, penguatan bank sampah, dan kerja sama dengan pihak lain. Interaksi pemerintah dengan masyarakat telah dilakukan melalui sosialisasi, seminar, rapat, dan edukasi, tetapi partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah, pemanfaatan bank sampah, dan pengelolaan lingkungan belum merata. Selain itu, penegakan aturan belum konsisten karena keterbatasan pengawasan dan sumber daya serta masih dominannya teguran dan pembinaan. Dengan demikian, efektivitas implementasi kebijakan memerlukan penguatan infrastruktur, sumber daya manusia, koordinasi antarinstansi, pengawasan, penjabaran teknis regulasi, serta partisipasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, A., & Rusfiana, Y. (2022). Teori dan analisis kebijakan publik. Alfabeta.
- Arini, N. W., Partama, I. G. D., & Surata, S. P. (2022). Evaluasi kebutuhan TPS berdasarkan aspek daya tampung, kesesuaian lokasi dan infrastruktur. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 18(4), 318–335.
- Dewi, D. (2022). Kebijakan publik: Proses, implementasi dan evaluasi. CV Pustaka Setia.
- Iriawan, H. (2024). Teori kebijakan publik. PT RajaGrafindo Persada.
- Khairunisa, & Widyarsana, I. M. W. (2025). Analisis keberlanjutan sistem pengelolaan sampah berbasis 3R (studi kasus MRF, TPST Kota Hijau, dan Bank Sampah Kota Hijau Balikpapan). *Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 9(3).
- Maghfuri, S., Murtiyasa, B., Sunarjono, S., & Hidayati, N. (2024). Perencanaan infrastruktur pengelolaan sampah di Kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 22(2), 491–502.
- Mansur, J. (2022). Implementasi konsep pelaksanaan kebijakan dalam publik. *Jurnal Ekonomi Islam*, 6, 324–334.
- Mulya Zein, M. H., Mahedar, S. J., & Septiani, S. (2024). Kolaborasi multi-stakeholder dalam pengelolaan sampah: Evaluasi model governance di Indonesia. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(4), 13893–13905.
- Nabila, A., Aziz, R., & Indah, S. (2024). Investigasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui bank sampah di Kota Padang. *Jurnal Serambi Engineering*, 9(1).
- Putra, W. T., & Ismaniar. (2022). Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah di bank sampah. *Jambura Journal of Community Empowerment*, 1–10.
- Ramadhan, G. (2024). Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bekasi. *Journal of Public Policy and Management Review*, 1–13.
- Rismayanti, R., Safitri, E. D., Putra, M. R. P., & Ashari, M. I. (2026). Analisis capaian kinerja sistem pengelolaan sampah di Indonesia 2019–2024. *Jurnal ESIT (E-Bisnis, Sistem Informasi, Teknologi Informasi)*, 20(3), 312–318.
- Rita Fiantika, F., Wasil, M., & Jumiyati, S. (n.d.). Metodologi penelitian kualitatif. Global Eksekutif Teknologi.
- Subagyo, A., & Kristian, I. (2023). Metode penelitian kualitatif.
- Syafer, E., & Putera, R. E. (2024). Analisa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Payakumbuh. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(5), 4568–4583.
- Yoga Jusri Pratama, M. M. (2022). Implementasi pelayanan publik: Teori dan praktik. CV Qiara Media.